



# Pengaruh Perkembangan Geopolitik dan Geostrategi Tiongkok

**Abdul Hafil Fuddin**  
Peseta PPSA XX Lemhannas RI

## Abstrak

*Dinamika lingkungan strategis di kawasan Asia Timur semakin kompleks. Negara-negara major powers dari kawasan lain pun ikut berperan dalam dinamika dan pembangunan di kawasan ini. Indonesia, sebagai salah satu negara yang mempunyai posisi strategis secara geografis maupun politik, mempunyai peran yang cukup penting dalam menjaga stabilitas kawasan ini. Oleh sebab itu, Indonesia perlu mendefinisikan dengan baik dan tepat kepentingan strategisnya dalam melakukan politik luar negeri.*



## LATAR BELAKANG.

Dinamika di lingkungan eksternal selama kurun waktu lima tahun mendatang (2015-2019) akan menempatkan Indonesia pada persimpangan jalan. Lingkungan strategis Indonesia, mulai dari tataran global dan regional Asia Timur, akan terus mengalami perubahan-perubahan penting yang akan menentukan relevansi, posisi, dan peran internasional. Kawasan Asia Timur merupakan kawasan dengan proses pergeseran kekuatan (*power shift*), yang memiliki implikasi strategis terhadap hubungan antara negara-negara besar dan pola perimbangan kekuatan (*balance of power*) di kawasan. Proses pergeseran kekuasaan ini akan semakin menemukan bentuknya serta lebih terasa implikasinya bagi Indonesia dalam waktu 5 sampai 15 tahun mendatang. Karena itu, posisi Indonesia di masa datang tidak dapat dilepaskan dari sejumlah implikasi strategis yang lahir dari kompleksitas lingkungan internasional di kawasan, khususnya perkembangan geopolitik Tiongkok yang semakin besar di kawasan Asia Tenggara.

Tiongkok mempunyai pengaruh semakin kuat di ASEAN, bahkan sudah mampu menandingi pengaruh Amerika Serikat di ASEAN. Dengan strategi jalur sutra atau dikenal dengan *String of Pearls*, Tiongkok melakukan hubungan bilateral dengan negara-negara yang dilalui oleh jalur sutra tersebut dengan membangun berbagai fasilitas infrastruktur guna mengamankan jalur perdagangan internasionalnya.

Kawasan Asia Timur akan diwamai oleh tiga kecenderungan yang saling terkait yaitu pertama Tiongkok, meskipun sedang mengalami sejumlah persoalan ekonomi, diperkirakan akan terus mengonsolidasi diri menjadi kekuatan besar (*great power*) baik di Asia Timur maupun dalam tataran global secara ekonomi, politik, dan militer. Pada gilirannya, fenomena kebangkitan Tiongkok mengukuhkan posisinya sebagai mesin pendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Timur lainnya, serta mengubah *power relations* di antara negara-negara besar di kawasan. Kedua, sebagai akibat dari kecenderungan pertama, pergeseran pusat gravitasi ekonomi-politik dunia ke Asia Timur akan semakin nyata. Kawasan ini akan menjadi kawasan paling dinamis dan mandala interaksi kepentingan negara-negara luar kawasan dan negara-negara kawasan. Ketiga, kerjasama ekonomi yang selama ini dilihat sebagai tempat bertemunya kepentingan yang sama bagi semua negara, kini akan menjadi bagian dari proses penyesuaian strategis (*strategic readjustment*) dan kompetisi pengaruh dari negara-negara besar. Pengaruh perkembangan geopolitik dan geostrategi Tiongkok terhadap kepentingan nasional Indonesia, tentunya menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menentukan strategi politik luar negeri.

## PEMBAHASAN

Pada Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015- 2019), arah kebijakan kerja sama ekonomi internasional dalam kurun waktu tersebut adalah mendorong kerja sama ekonomi internasional yang lebih selektif dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan ekspor, pariwisata, dan investasi, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan dengan beberapa strategi antara lain peningkatan dialog dan kerja sama teknis di bidang ekonomi dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara guna memperkuat integritas kawasan serta menjamin kestabilan politik dan ekonomi kawasan dan nasional. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan penyusunan *road map* kerangka kerja sama ekonomi maritim dalam rangka mendukung pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan wilayah maritim Indonesia yang lebih baik.<sup>1</sup>

Perencanaan strategis pembangunan luar negeri Indonesia terhadap perkembangan geopolitik kawasan Asia Timur khususnya Tiongkok merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia yang menjadi permasalahan bagaimana mengelola fenomena kebangkitan Tiongkok tersebut. Langkah dan upaya yang dilakukan pemerintah, menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dengan Tiongkok berjalan baik karena kedua negara tersebut saling membutuhkan. Indonesia di mata Tiongkok, di samping merupakan pasar yang sangat strategis bagi penyaluran

produk-produknya, juga sebagai mitra yang penting dalam kaitannya dengan kerjasama dan hubungan internasional dengan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN). Sebaliknya, perekonomian Tiongkok yang tangguh merupakan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan perdagangan di berbagai sektor, selain penyelenggaraan pasokan komoditas dan energi yang telah lama dijalankan. Kemitraan itulah yang harus dapat dipelihara dan ditingkatkan secara berkesinambungan. Kajian strategis yang senantiasa dikembangkan guna mendapatkan data faktual tentang *current issue* sangat penting dilakukan oleh setiap pemimpin tingkat nasional Indonesia untuk menjadi acuan dalam memelihara hubungan yang saling menguntungkan negara dan bangsa.<sup>2</sup>

Kemajuan ekonomi ini memungkinkan Tiongkok untuk mengalokasikan sebagian dari kekayaannya itu untuk memodernisasi dan membangun kekuatan militer. Pada saat yang sama, semakin pentingnya Tiongkok secara ekonomi dan militer memberi ruang bagi Beijing untuk memperkuat posisi diplomatik dan pengaruhnya di kawasan. Semuanya ini berpotensi melahirkan sebuah pergeseran kekuatan terpenting sejak Perang Dunia II, dengan segala kemungkinan implikasinya, baik yang positif maupun negatif. Akibatnya, kawasan Asia Timur dihadapkan pada persoalan klasik dalam hubungan internasional, yakni bagaimana merespon dan mengelola lahirnya kekuatan baru.



Gelombang perdagangan bebas dan tekanan integrasi ekonomi regional akan semakin besar dalam beberapa tahun ke depan. Kawasan Asia Timur akan segera menjadi pasar dan basis produksi tunggal (*single market and production base*). Perdagangan bebas telah menjadi agenda yang didorong oleh hampir semua negara di Asia Timur. Proses perundingan *Trans-Pacific Partnership* (TPP), kesepakatan *Region Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), dan pembicaraan mengenai perdagangan bebas antara Tiongkok, Japan, dan Korea Selatan, merupakan contoh paling mutakhir dari kuatnya dorongan untuk mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan. Persoalan semakin rumit apabila berbagai visi kerjasama ekonomi regional yang ada, seperti TPP dan RCEP menjadi sumber perbedaan baru di kawasan. Tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana mentransformasikan dirinya menjadi bagian dari basis produksi regional dan global, bukan hanya menjadi bagian dari pasar tunggal tersebut.

Persoalan juga menjadi semakin kompleks ketika AS menegaskan bahwa keamanan alur laut di kawasan Laut China Selatan dan kebebasan navigasi merupakan bagian dari kepentingannya. Sementara itu, sengketa antara Tiongkok dengan Jepang atas kepemilikan Senkaku/Diaoyutai telah memperburuk hubungan kedua negara itu. Dengan meningkatnya kemungkinan rivalitas antar negara besar, menjadi semakin sulit dicari jalan penyelesaiannya. Oleh karena itu, tantangan bagi

negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, adalah bagaimana mencegah sengketa wilayah maritim ini menjadi sumber instabilitas regional.

## **Kepentingan Strategis Indonesia**

Dalam dinamika dan kompleksitas geopolitik Asia Timur seperti digambarkan di atas, apa saja yang menjadi kepentingan strategis Indonesia yang akan menjadi penjuror bagi pelaksanaan politik luar negeri dalam lima tahun mendatang? Secara garis besar, kepentingan dan tujuan politik luar negeri Indonesia dalam lima tahun ke depan akan dititikberatkan pada upaya mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerja sama internasional. Indonesia juga akan menguatkan diplomasi *middle power* yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo Pasifik, dan meningkatkan pelibatan peran, aspirasi serta kepentingan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri, dan menata infrastruktur diplomasi. Diplomasi *middle power* dalam hal ini dipahami sebagai diplomasi Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya yang cukup berpengaruh dan diakui di dunia internasional, memiliki posisi geografis dan ideologis yang signifikan, serta menunjukkan perilaku internasional yang bertanggung jawab, pro- multilateralisme dan



mengadopsi prinsip “*good international citizenship*”.<sup>3</sup>

Namun, dalam konteks jangka menengah lima tahun kedepan, khususnya dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik seperti yang digambarkan di atas, kepentingan strategis Indonesia di kawasan Asia Timur dapat dioperasionalkan dalam enam agenda penting, yaitu:

*Pertama*, Indonesia berkewajiban untuk mempertahankan relevansi ASEAN di tengah dinamika Asia Timur.

*Kedua*, Indonesia berkepentingan untuk menjaga agar otonomi strategis kawasan Asia Tenggara, sehingga kawasan ini tidak kembali menjadi ajang pertarungan pengaruh dari negara-negara besar.

*Ketiga*, Indonesia harus memoderasi, atau meminimalisasi, implikasi dari rivalitas antara negara-negara besar.

*Keempat*, Indonesia berkepentingan untuk meredakan ketegangan di wilayah laut strategis, khususnya di kawasan Laut China Selatan dan Samudera Hindia.

*Kelima*, tetap penting bagi Indonesia untuk mempertahankan dan bahkan memperluas perolehan-perolehan ekonomi dari kawasan, khususnya di bidang perdagangan, investasi, kerjasama finansial, dan akses pasar.

*Keenam*, perlunya memfasilitasi integrasi regional yang telah menjadi tujuan utama ASEAN melalui kesepakatan

pembangunan komunitas ASEAN

Perkembangan dalam negeri Indonesia, sejak keberhasilan melewati transisi demokrasi yang sulit, dan terjadinya transformasi ekonomi dan politik regional yang menyatukan Asia Tenggara dan Asia Timur Laut ke dalam sebuah entitas geoekonomi dan geopolitik yang kini disebut Asia Timur, telah Indonesia mulai “keluar” dari keterpasungannya dalam “sangkar emas” ASEAN. Indonesia, yang menyadari berbagai perkembangan baru di lingkungan eksternal, mulai menjalankan politik luar negeri yang dapat disebut sebagai pasca-ASEAN. Hal ini antara lain terlihat dari respon Indonesia terhadap dinamika lingkungan strategis di Asia Timur selama kurun waktu sepuluh tahun belakangan.

Secara normatif, politik luar negeri Indonesia tetap didasarkan pada prinsip bebas-aktif dan memelihara hubungannya dengan AS dan Tiongkok. Hal itu dilakukan dengan mendorong partisipasi yang lebih aktif dari negara-negara besar dan negara-negara kawasan dalam proses regional. Indonesia, misalnya, mendukung keterlibatan India, Australia dan Selandia Baru dalam *East Asia Summit*. Pada tahun 2010, mengundang AS dan Rusia untuk menjadi anggota. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan kerangka kerja sama multilateral berbasis ASEAN, yang berfungsi sebagai wadah untuk memfasilitasi hubungan kooperatif antara negara-negara besar, khususnya antara AS dan Tiongkok,



sehingga tidak ada satu kekuatan pun yang berusaha untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan.

Indonesia bertindak sebagai kekuatan reformis dalam ASEAN, dengan memperluas agenda kerjasama organisasi ini untuk ikut juga mengembangkan demokrasi dan menghormati hak asasi manusia, yang pada gilirannya mendorong proses transformasi ASEAN menjadi aktor regional yang relevan dengan tantangan-tantangan yang ada. Namun, dalam konteks mengantisipasi kompleksitas geopolitik dalam kurun waktu lima tahun mendatang, respon Indonesia perlu mendapat penyesuaian baru, yakni melalui reposisi strategis. Indonesia perlu secara tegas melihat dan membangun identitasnya sebagai *middle power*. Selain itu, Indonesia juga perlu melihat dinamika geopolitik yang berkembang dewasa ini, yang akan semakin menemukan bentuknya dalam kurun waktu lima tahun mendatang, Indonesia perlu memperluas mandala keterlibatannya (*space of engagement*), dari kawasan Asia Timur ke kawasan Indo-Pasifik. Melalui transformasi identitas (*middle power*) dan perluasan mandala keterlibatan (Indo-Pasifik), politik luar negeri Indonesia untuk kurun waktu lima tahun mendatang perlu memberi perhatian kepada sejumlah agenda sebagai berikut.

Pada tataran global, Indonesia perlu meningkatkan keterlibatannya dan berperan secara aktif serta selektif dalam masalah-masalah internasional yang terkait langsung dengan kepent-

ingan strategis Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam forum-forum global antara lain G-20 dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) diharapkan dapat memberi kontribusi bagi upaya pencarian solusi terhadap berbagai masalah global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, stabilitas finansial global, keamanan energi dan pangan, sistem perdagangan yang adil, dan transisi demokrasi yang damai.

Sedangkan pada tataran regional, kebijakan luar negeri Indonesia perlu tetap difokuskan pada upaya untuk menjaga dan memperkuat otonomi strategis kawasan Asia Tenggara, melalui pelaksanaan sejumlah agenda yaitu membangun keseimbangan antara penekanan pada multilateralisme dan hubungan bilateral. Multilateralisme meliputi keterlibatan dalam ASEAN, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), ARF, APT, dan ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM) dan ADMM Plus. Sementara, pengembangan hubungan bilateral strategis adalah dengan negara-negara besar di kawasan (AS, Tiongkok, India, Jepang) dan negara-negara menengah (Australia dan Korea Selatan).

Indonesia juga harus meningkatkan peran dalam membangun keamanan maritim dan *good order at sea*, yang meliputi dua sarnudera strategis, yaitu Samudera Hindia dan Laut China Selatan. Untuk itu, Indonesia perlu melanjutkan peran aktifnya dalam mencari solusi bagi penyelesaian sengketa teritorial maritim, baik yang



bersifat bilateral maupun multilateral. Dalam hal sengketa “multilateral” perhatian khusus perlu diberikan kepada proses pengelolaan konflik di Laut China Selatan.

Pada tataran nasional, untuk mendukung agenda global dan regional, Indonesia perlu melakukan pembenahan dan penyempurnaan struktur, proses, mekanisme, dan sarana pelaksanaan kebijakan luar negeri dan diplomasi. Hal ini antara lain mencakup reorganisasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang meskipun sudah berjalan tetapi masih tetap perlu disempurnakan, perluasan partisipasi publik dalam proses kebijakan, dan koordinasi baik antar-departemen maupun dengan badan legislatif. Dengan agenda dan lingkup politik luar negeri Indonesia, penambahan sumber daya manusia, khususnya jumlah diplomat, di lingkungan Kemlu menjadi sebuah keniscayaan. Namun, penambahan kuantitas ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas para diplomat Indonesia.

Selain itu, perumusan kebijakan luar negeri dan pelaksanaan diplomasi membutuhkan keterlibatan, dukungan, dan partisipasi masyarakat lebih luas. Oleh karena itu, dalam kurun lima tahun mendatang, Kemlu diharapkan semakin intensif dalam melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri.

## Kesimpulan

Perkembangan geopolitik dan geostrategi Tiongkok sangat berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia, terutama disebabkan oleh bergesernya pusat gravitasi ekonomi-politik dunia dari Barat ke kawasan Asia-Pasifik, khususnya Asia Timur. Oleh karena itu, posisi dan kebijakan luar negeri Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejumlah implikasi strategis yang lahir dari kompleksitas lingkungan eksternal sebagai akibat dari pergeseran pusat gravitasi tersebut.

Respon tepat dalam menghadapi berbagai tantangan lima tahun ke depan membutuhkan reposisi strategis Indonesia, baik berupa transformasi identitas sebagai *middle power*, maupun dengan perluasan mandala keterlibatan (*space of engagement*) dari Asia Timur ke Indo-Pasifik. Melalui reposisi strategis ini, Indonesia akan lebih leluasa dalam memenuhi kepentingan strategisnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Perpres RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- Tor Diskusi Pendalaman PPSA XX Tahun 2015 BS. Lingkungan Strategis Kontemporer
- Perpres RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, hlm 5-25



Soemadi D.M Brotodinoingrat, Staf Khusus Menhan Bidang Kerjasama Internasional, Bahan Ceramah di PPSA XX Lemhanas tentang Pemahaman Regionalisme, 15 September 2015

(Endnotes)

- 1 Perpres RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- 2 Tor Diskusi Pendalaman PPSA XX Tahun 2015 BS. Lingkungan Strategis Kontemporer
- 3 Perpres RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, hlm 5-25